V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan pada bab IV (empat) sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Rasio Tingkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung periode 2001 - 2012, nilai rata-rata rasio adalah 100,43%. Dengan demikian, dapat dikatakan Tingkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terdapat pada klasifikasi tingkat Sangat Baik.
2. Pada rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Lampung periode 2001 - 2012, nilai rata-rata rasio adalah 89,53%. Dengan demikian, dapat dikatakan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Lampung terdapat pada tingkatan Sangat Tinggi.
3. Pada Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah Provinsi Lampung periode 2001 - 2012, nilai rata-rata rasio adalah 40,43%. Dengan demikian, dapat dikatakan

Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Provinsi Lampung terdapat pada tingkatan Baik.

4. Pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Lampung periode 2001 - 2012, nilai rata-rata dari rasio adalah 81,87%. Dengan demikian, dapat dikatakan Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Lampung terdapat pada tingkatan Cukup Efisien.
5. Pada Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran periode 2001 - 2012, rata-rata nilai pertumbuhan PAD *(growth)* adalah 25,62 sedangkan rata-rata nilai peranan PAD *(share)* adalah 63,08. Dengan demikian pada kuadran I terdapat 4 titik (2002, 2003, 2005, 2010) kuadran II terdapat 2 titik (2004, 2008) , kuadran III terdapat 0 titik, dan kuadran IV terdapat 5 titik (2006, 2007, 2009, 2011, 2012).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam upaya untuk memperbaiki Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

1. Pemerintah daerah hendaknya mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dan menghemat penerimaan dari pusat, dengan cara mengelola penerimaan dari pusat tersebut secara rinci dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut, lalu dikelola dengan baik sehingga dapat mengurangi adanya ketergantungan fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Pemerintah daerah hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif terutama disektor PAD. Penggalian sumber-sumber daerah dan meningkatkan arus investasi ke daerahnya sehingga berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.